BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹

Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penegasan tersebut termaktub secara jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri yang dilandasi nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun demikian, dalam dinamika berumah tangga, perceraian tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi, meskipun bukan merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Pada prinsipnya, perkawinan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi dalam kenyataannya terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.² Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *thalaq*. Secara etimologis, *thalaq* berarti melepaskan atau membebaskan ikatan pernikahan. Adapun secara terminologis, *thalaq* dipahami sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz *thalaq* atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.

Keabsahan *thalaq* didasarkan pada al-quran Qs. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

“*Thalaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 231 terdapat larangan berbuat madharat terhadap istri:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³

Terdapat kaidah Nahi dalam Ushul Fiqh kaitannya dengan larangan berbuat madharat terhadap istri. Adapun kaidahnya sebagaimana berikut:

² Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang” (Bandung: Pustaka Setia, 2008). h. 47

³ Muchaeroni, *Al-Qur’an Al-Mubayyin Tematik* (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020). h. 38

الاصـل في النهي للتحريم

“Asal dari larangan adalah haram ”

Membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah, karena sering kali muncul kesalahpahaman antara suami dan istri dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga yang sulit diatasi secara internal. Apabila penyelesaian ditempuh melalui jalan damai, maka masing-masing pihak berhak mengutus seorang *hakam* sebagai penengah. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surah An Nisa ayat 35 yakni:⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Yaitu dalam ketentuan Pasal 38 Putusnya Perkawinan terjadi karena:⁵ Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Untuk melaksanakan perceraian salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Pengaturan mengenai perceraian di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Naladama,2004) h. 109

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 19. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya satu atau beberapa alasan tertentu diantaranya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada penambahan Ayat g dan h yang berbunyi:
- f. yaitu suami melanggar taklik talak;
 - g. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui sidang pengadilan setelah hakim menyatakan tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri yang hendak bercerai. Keberadaan Peradilan Agama memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Peradilan Agama, yang menetapkan kompetensinya berdasarkan asas personalitas keislaman serta bidang-bidang hukum tertentu. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama

meliputi pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama antara sesama pihak yang beragama Islam dalam berbagai aspek hukum, yaitu:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Gugatan perceraian termasuk salah satu perkara yang memiliki keterkaitan erat dengan perkawinan dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara, hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan sekaligus konsekuensi hukum yang akan timbul di kemudian hari. Perceraian dikategorikan sebagai perkara perdata agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus. Keputusan diterima atau ditolaknya gugatan perceraian sangat bergantung pada pertimbangan hakim terhadap alasan serta dalil yang diajukan dalam permohonan atau gugatan tersebut.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁶ Salah satu tugas pokok hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah menyelidiki serta memastikan ada atau tidaknya hubungan hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan. Proses ini merupakan bagian dari asas *judex facti* dalam hukum acara perdata, di mana hakim wajib menilai

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

fakta hukum yang diajukan oleh para pihak. Untuk itu, hakim memerintahkan dilakukannya pembuktian dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan serta membuktikan dalil-dalil yang menjadi landasan gugatan maupun bantahannya. Mekanisme pembuktian tersebut bertujuan memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan pada klaim semata, melainkan pada fakta hukum yang terbukti secara sah di persidangan.

Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 106 sebagai berikut:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ إِنَّمَا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw yaitu sebagai berikut:⁸

عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

⁷ Tim Redaksi Alfatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta Selatan: PT. Insan Media Pustaka, 2013). h. 125.

⁸ Abu Bakar Ahmad bin Al-Hussein bin Ali Al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-Kabir* (Kairo: Markaz Hajr Lilbuhuth Waldirasat Al-Arabiah Wal'islamiyah, 2011). Jilid 21. h. 243

Artinya: “Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi pembuktian itu dimintakan kepada si penggugat (penggugat harus dapat membuktikan gugatannya) dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat” .

Ayat dan hadis yang telah disebutkan menegaskan bahwa dalam setiap perselisihan maupun perkara hukum, para pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk membuktikan hak-haknya dengan menghadirkan saksi yang jujur serta adil. Prinsip ini sejalan dengan kaidah hukum acara perdata Islam yang menempatkan beban pembuktian (*burden of proof*) pada pihak yang mengajukan dalil, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *al-bayyinat ‘ala al-mudda’i wa al-yamin ‘ala man ankara*, yang berarti “pembuktian diwajibkan bagi pihak penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menyangkal.” Oleh karena itu, penggugat dituntut untuk menyajikan bukti yang mendukung tuntutananya, baik berupa saksi, dokumen, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Apabila penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima, sehingga tergugat terbebas dari kewajiban maupun tanggung jawab yang dituduhkan kepadanya.

Hukum acara perdata mengatur terkait dengan macam-macam alat bukti yang dapat di hadirkan di persidangan yaitu pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, yakni antara lain, bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti saksi.⁹ Alat bukti saksi merupakan salah satu dari alat bukti yang sah dan diakui, saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami secara langsung sebagai bukti keberlangsungan peristiwa atau keadaan tersebut.¹⁰ Kesaksian seseorang dapat diakui secara sah terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi. Apabila

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 556

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h. 165

seseorang telah dipanggil dengan patut oleh pengadilan, maka ia berkewajiban untuk memberikan kesaksiannya.

Keterangan saksi dalam proses peradilan memiliki persyaratan formil dan materiil yang harus dipenuhi secara bersamaan, sebagaimana halnya alat bukti lainnya. Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga ketidakterpenuhan salah satunya menjadikan kesaksian tidak sah sebagai alat bukti. Apabila seluruh syarat formil terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun terdapat kekurangan dalam syarat materiil, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, apabila syarat materiil telah terpenuhi tetapi terdapat cacat dalam syarat formil, kesaksian juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Adapun syarat formil saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Orang yang cakap menjadi saksi (undang-undang sendiri menentukan lain).
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai, kecuali UU menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain.
5. Diperiksa satu per satu.
6. Mengucapkan sumpah.

Sedangkan syarat materiil dari saksi yaitu:¹²

1. Keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).
2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan (menerangkan apa yang dialami, dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi).

¹¹ Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* h. 633-642

¹² Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* h. 648-655.

3. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan seperti pendapat, dugaan, perasaan, dan kesan pribadi saksi.
4. Saling bersesuaian satu sama lain.

Hukum Acara Islam mengenal konsep pembuktian dengan istilah *syahadah*. Kesaksian menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan pandangan para sahabat dipahami sebagai segala sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan kebenaran. Tidak terdapat larangan penggunaan saksi sebagai alat bukti sepanjang tidak bertentangan dengan firman Allah maupun sabda Rasul. Seorang saksi dituntut untuk bersikap adil, sedangkan para pihak yang berperkara diwajibkan menghadirkan dua orang saksi guna memperkuat dalil yang diajukan.¹³

Hukum Acara Islam juga menerangkan terkait syarat-syarat saksi diantaranya:¹⁴

1. Al-Islam (Islam).
2. Al-Bulugh wa Al-Aql (Baligh dan berakal).
3. Al-Adalah (Adil).
4. Al-Dzukurah (Laki-Laki).
5. Al-Hurriyah (Merdeka).
6. Al-Musyadah (Menyaksikan langsung).
7. Tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara.

Perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan atau pertengkarannya memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan perkara lainnya, khususnya dalam aspek pembuktian, karena saksi yang diprioritaskan berasal dari pihak terdekat. Perselisihan yang terjadi secara berulang antara suami dan istri dapat menimbulkan kondisi di mana kehidupan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan, meskipun istri tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengajukan perceraian, sedangkan suami tetap menolak untuk menceraikan.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 76

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh*, juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr), 1989, h. 5649–5655.

Perselisihan semacam ini pada hakikatnya merupakan peristiwa domestik yang bersifat rahasia serta cenderung ditutup-tutupi, sehingga mustahil dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis sebagaimana lazimnya alat bukti perdata lain. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan saksi yang menyaksikan langsung pertengkaran suami istri sangat sulit ditemukan, namun hal ini tidak mengurangi kedudukan saksi sebagai salah satu alat bukti yang utama dalam perkara perceraian.¹⁵

Keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian dapat terbagi ke dalam beberapa kondisi. Pertama, kedua saksi sama-sama melihat dan mendengar secara langsung sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kedua, salah seorang saksi memiliki pengetahuan langsung, sementara saksi lainnya hanya mendengar dari cerita. Ketiga, kedua saksi hanya memperoleh informasi dari cerita tanpa mengalami langsung peristiwa yang dimaksud. Keempat, kedua saksi tidak mengetahui secara langsung maupun melalui cerita, tetapi hanya mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perselisihan. Setiap kondisi tersebut tentu memiliki perbedaan dalam pertimbangan hukum, sehingga hakim harus berhati-hati dalam menilai keterangan saksi, bahkan ketika menggunakan format baku dalam putusan, karena tidak semua perkara memungkinkan saksi memiliki pengetahuan langsung yang sesuai dengan posita. Dalam hukum acara Islam dikenal konsep *syahadah istifadah*, yaitu kesaksian dari pihak ketiga yang tidak menyaksikan atau mendengar secara langsung suatu peristiwa hukum, melainkan berdasarkan berita yang telah tersebar luas. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *syahadah istifadah* adalah bentuk kesaksian yang bersumber dari pengetahuan yang telah dikenal luas oleh masyarakat.¹⁶ *Istifadah* juga dapat diartikan sebagai ketenaran yang menghasilkan dugaan. Terlepas bahwa saksi tersebut

¹⁵ Muhamad Tambusai Ad Daulay and M H SHI, "*Rasionalisasi Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama*", (<https://mail.pa-sampang.go.id> diakses 20 agustus 2025).

¹⁶ Abd. Manaf, *Syahadah Al – Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan*, (www.badilag.net diakses 20 Agustus 2025).

merupakan saksi *Istifadah* yaitu saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung namun kebenaran suatu peristiwa hukum harus tetap ditegakan.

Hal itu sesuai dengan ayat Al – Qur'an , QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Saksi yang memiliki keyakinan atas peristiwa yang ia ketahui maka tidak perlu ragu untuk disampaikan dalam persidangan sebab para ahli fiqih merumuskan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:¹⁷

اليقين لا يزول بالشك

Artinya: “Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan”

Realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sering kali menghasilkan putusan yang berbeda, baik berupa dikabulkannya maupun ditolaknya gugatan, meskipun substansi pokok perkara pada dasarnya serupa. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya variasi dalam pertimbangan majelis hakim, baik terkait penerapan hukum, penilaian terhadap keterangan saksi, maupun faktor-faktor lainnya. Pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg, misalnya, dalam posita dijelaskan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang bersumber dari persoalan ekonomi, di mana tergugat dinilai malas bekerja serta

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1970) h. 35.

kurang memberikan perhatian kepada penggugat maupun terhadap perkembangan pendidikan anak-anak.

Penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian. Saksi kedua memang tidak mengetahui secara pasti ada atau tidaknya komunikasi yang baik sebagai bentuk maupun akibat dari perselisihan yang menjadi pokok gugatan, namun ia menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020. Perpisahan tersebut terjadi ketika penggugat berangkat bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan dengan tujuan membiayai pendidikan anak-anaknya. Keterangan tersebut menunjukkan adanya akibat nyata dari perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Selain itu, saksi kedua juga menjelaskan bahwa selama penggugat bekerja di Taiwan dan mengirimkan uang kepada tergugat, anak-anak tidak disekolahkan, yang mengindikasikan bahwa tergugat tidak lagi memperhatikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Oleh sebab itu, kesaksian saksi kedua patut dipertimbangkan karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama.

Alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menilai fakta hukum. Gugatan cerai tersebut pada akhirnya ditolak karena penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua tidak memenuhi syarat materiel kesaksian, sebab tidak mengetahui secara pasti ada atau tidaknya komunikasi antara penggugat dan tergugat, sehingga kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya di muka pengadilan, serta sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi.

Menimbang atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Alasan Hakim Menolak Kesaksian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian pada putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg,
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Dasar Pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian pada putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg,
3. Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan baik di kalangan mahasiswa Ahwal Syakhsiyah khususnya, dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara umum berkenaan dengan Analisis Yuridis

Terhadap Alasan Hakim Menolak Kesaksian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg.

2. segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan praktisi khususnya di Pengadilan Agama Cilegon terhadap Kesaksian Dalam Perkara Cerai Gugat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berfungsi untuk memetakan serta memberikan gambaran mengenai kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Pemaparan penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan topik yang serupa, sekaligus menegaskan posisi serta kebaruan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁸

Setelah peneliti melakukan penelusuran ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih sama dengan Analisis Yuridis Terhadap Alasan Hakim Menolak Kesaksian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg. Adapun penelitian terdahulu mengenai judul penelitian ini, dimana hasil penelusuran peneliti yang meliputi tesis dan skripsi diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*”.¹⁹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim PA Kebumen Kelas 1A dalam menolak permohonan cerai talak di persidangan nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dan menganalisis putusan PA Kebumen Kelas 1A

¹⁸ Cik Hasan Bisri, ‘*Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*’, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004). h. 207

¹⁹ Sri Hanifah MR, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*”, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, 2023) .

Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Persamaan dari Skripsi ini dengan yang akan penulis teliti adalah bagaimana hakim pengadilan Agama dalam mempertimbangkan dan menilai kesaksian saksi dalam perkara cerai yang diajukan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dalam Skripsi tersebut mengkaji Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang cerai talak. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah *Grand theory, middle theory* dan *Oprational theory*.

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian*” (*Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk*)”.²⁰

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui deskripsi tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A. dan pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

Persamaan dari Skripsi ini dengan yang akan penulis teliti Adalah tentang pembuktian di lingkungan pengadilan agama dalam hal ini yaitu perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dalam Skripsi tersebut mengkaji tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah *Grand theory, middle theory* dan *Oprational theory*.

²⁰ Chudori Syamsudin Yahya, “*Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian*” (*Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk*)”, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

3. Skripsi yang berjudul “*Cerai gugat akibat perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga menurut kompilasi hukum islam*”.²¹

Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk-bentuk perselisihan dalam Rumah Tangga yang berdampak pada perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Apakah Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan alasan- alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan dari penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselisihan terus menerus. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji bentuk perselisihan yang berdampak terhadap perkara perceraian menurut kompilasi hukum islam serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan kompilasi hukum islam. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah *Grand theory, middle theory* dan *Oprational theory*.

4. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek*”.²²

Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab perceraian antara suami istri di Kabupaten Malang, dan landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian pada perkara cerai gugat dengan putusan Verstek.

Persamaan dari penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang Gugatan perceraian dan

²¹ ZM Farhan Naufal. ‘*Cerai Gugat Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Rumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam*’ (Padang: Universitas Andalas Padang, 2024).

²² Firmansyah, “*Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek*”. (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

Pembuktiannya di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji faktor penyebab perceraian antara suami istri, dan landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian pada perkara cerai gugat dengan putusan Verstek. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah *Grand theory, middle theory* dan *Oprational theory*.

5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak Dalam Perespektif Teori Hukum Pembuktian (studi putusan Pengadilan Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.)*”.²³

Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Persamaan dari penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas Penolakan Perkara perceraian dan Pembuktiannya di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan menggunakan Perspektif Teori Hukum Pembuktian, Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah *Grand theory, middle theory* dan *Oprational theory*.

²³ Achmad Khoirul Muna, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak Dalam Perespektif Teori Hukum Pembuktian (studi putusan Pengadilan Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn)*.” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

NO		
1.	Sri Hanifah MR	
	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama dalam meneliti tentang bagaimana hakim pengadilan Agama dalam mempertimbangkan dan menilai kesaksian saksi dalam perkara cerai yang diajukan.	penelitian dalam Skripsi tersebut mengkaji Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang cerai talak. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah <i>Grand theory, middle theory</i> dan <i>Oprational theory</i> .
2	Chudori Syamsudin Yahya	
	Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)	

	Persamaan	Perbedaan
	penelitian ini bertitik tolak pada pembuktian di lingkungan pengadilan agama dalam hal ini yaitu perkara cerai gugat.	penelitian dalam Skripsi tersebut mengkaji tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah <i>Grand theory, middle theory</i> dan <i>Oprational theory</i> .
	ZM Farhan Naufal	
3.	Cerai gugat akibat perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga menurut kompilasi hukum islam	
	Persamaan	Perbedaan
	penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselisihan terus menerus.	skripsi tersebut mengkaji bentuk perselisihan yang berdampak terhadap perkara perceraian menurut kompilasi hukum islam serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan kompilasi hukum islam. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor

		454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah <i>Grand theory,middle theory</i> dan <i>Oprational theory</i> .
	Firmansyah	
4.	Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama dalam mengkaji tentang Gugatan perceraian dan Pembuktiannya di Pengadilan Agama.	penelitian dalam skripsi tersebut mengkaji faktor penyebab perceraian antara suami istri , dan landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian pada perkara cerai gugat dengan putusan Verstek. Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah <i>Grand theory,middle theory</i> dan <i>Oprational theory</i> .
5.	Achmad Khoirul Muna	

Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak Dalam Perespektif Teori Hukum Pembuktian (studi putusan Pengadilan Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn)	
Persamaan	Perbedaan
sama-sama membahas Penolakan Perkara perceraian dan Pembuktiannya di Pengadilan Agama.	penelitian dalam skripsi tersebut mengkaji tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan menggunakan Perspektif Teori Hukum Pembuktian, Sedangkan penulis memfokuskan mengkaji alasan hakim menolak kesaksian saksi dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg tentang perkara Cerai gugat, Dan teori yang di gunakan adalah <i>Grand theory, middle theory</i> dan <i>Oprational theory</i> .

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan seperangkat konsep yang berfungsi sebagai abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan penelitian. Penyusunan kerangka berpikir dimaksudkan agar penelitian memiliki landasan teoritis yang jelas dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory* sebagai dasar analisis guna menjawab pertanyaan penelitian sekaligus memecahkan permasalahan yang diangkat.²⁴

Grand theory merupakan Teori yang mendasari Teori-teori (*Middle theory* dan *Operational Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian ini Q.s. At-Thalaaq ayat 2. Sebagai korelasi antara perceraian dan kesaksian,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُم يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا[۝]

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur, yakni membentuk keluarga yang dilandasi nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam praktiknya, perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai rintangan dan konflik yang dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Apabila perselisihan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka perceraian menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang tersedia. Perkawinan yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya berpotensi menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI press, 1986). h. 53

ketika suami dan istri sudah saling mengabaikan, bahkan berdampak negatif terhadap anak-anak yang ada di dalam keluarga. Dengan demikian, ketika ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak lagi dapat dipertahankan akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menghindari timbulnya *madharat* yang lebih besar.

Kaidah fikih yang digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini menegaskan bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri pada dasarnya dibolehkan menurut hukum Islam, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kemudharatan, khususnya bagi istri dan anak-anak yang berada pada posisi lemah akibat perceraian. Proses perceraian tidak seharusnya menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi salah satu pihak. Baik hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional memberikan ruang bagi terjadinya perceraian, dengan ketentuan bahwa perceraian tersebut harus membawa kemaslahatan dan menjadi jalan keluar dari kondisi yang menyakitkan bagi suami istri. Hal ini terutama berlaku ketika kehidupan rumah tangga diliputi konflik, pertengkaran, dan percekcoakan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga perdamaian tidak lagi memungkinkan untuk diwujudkan.

Terdapat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan."

Operational theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Teori ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas, konsisten, serta ditetapkan oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yuridis yang dapat menjamin fungsi hukum sebagai

²⁵ Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, h. 34

pedoman yang wajib ditaati. Dengan demikian, hukum mampu memberikan perlindungan serta kepastian bagi para pihak yang terikat dalam suatu perkara.

Konsep kepastian hukum merujuk pada ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan serta diundangkan secara jelas, konsisten, dan logis guna mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian. Tahapan pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi langkah utama untuk mengungkap fakta-fakta yang dapat menegaskan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, pembuktian berfungsi untuk memastikan bahwa peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Keterangan yang diberikan oleh saksi bertujuan untuk menjelaskan pokok peristiwa yang memiliki keterkaitan langsung maupun relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum, dibutuhkan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai dan memberikan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang berdiri sendiri, sepanjang memiliki kesesuaian serta hubungan yang saling menguatkan mengenai suatu peristiwa. Lebih lanjut, Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata menegaskan bahwa dalam menilai kesaksian, hakim wajib memberikan perhatian terhadap kesesuaian keterangan para saksi dengan sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok perkara. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan alasan yang mendorong para saksi memberikan keterangan, serta memperhatikan aspek-aspek lain seperti latar belakang kehidupan, kesusilaan, dan kedudukan sosial para saksi yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kesaksian yang disampaikan.